

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil dari penelitian berikut memberikan gambaran kepada peneliti tentang beberapa hal yang berkaitan dengan alternatif pengelolaan sampah, faktor-faktor yang mempengaruhi dan strategi perencanaan untuk pengelolaan sampah. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Inovasi Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pakusari Kabupaten Jember.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Judul	Hasil Kesimpulan Penelitian	Relevansi dengan penelitian ini	Perbedaan dengan penelitian ini
1.	Maya Auliya Agustin (2019) dalam jurnal “Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talangagung Sebagai Kawasan Wisata Edukasi”	Diperlukan adanya sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sampah, yaitu dari pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta; lebih lanjut terciptanya partisipasi masyarakat terkait pengelolaan sampah sejak dari sumbernya; terjadinya perubahan positif dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan	Alternatif pengelolaan sampah melalui wisata edukasi pada TPA	Mendeskripsikan proses dan dampak pengelolaan sampah melalui program inovasi daerah.

		adanya perubahan TPA menjadi kawasan wisata edukasi.		
2.	Firmansyah, Fatimah, Mubarakah (2016) dalam jurnal “Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat”	Terciptanya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik; Terjadi peningkatan pendapatan kelompok pengelola Bank Sampah dan nasabahnya; Berjalannya usaha kerajinan berbahan sampah yang dikelola oleh ibu-ibu di Desa Karanganyar; dan Terbangunnya kemitraan para pihak yang terkait dalam pengelolaan sampah.	Alternatif pengelolaan sampah melalui program bank sampah	Menganalisis pengelolaan sampah melalui inovasi pemerintah daerah
3.	Rizqi Puteri Mahyudin (2014) dalam jurnalnya “Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan”	Sejumlah besar sampah harus dikelola dengan Pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan terintegrasi atau ISWM/ <i>Integrated Sustainable Waste Management</i> fokus pada pengelolaan sampah sebagai multi aktor, kesepakatan multi lapisan sistem sosial teknik agar meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengurangan beban lingkungan pada TPA.	Alternatif pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan	Mendeskripsikan aplikasi pengelolaan sampah melalui program inovasi daerah.
4.	A.E. Adeniran et al (2017) dalam jurnalnya	Kebijakan strategis dan partisipasi mahasiswa diperlukan untuk mengurangi sumber dan	Alternatif model pengelolaan	Fokus yang diambil hanya

	yang berjudul <i>“Solid Waste Generation And Characterization In The University Of Lagos For A Sustainable Waste Management”</i>	memperbaiki daur ulang limbah serta dapat menjadi dasar keputusan yang lebih baik mengenai strategi berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di kampus.	sampah perkotaan, yaitu dengan 3R+1P ( <i>reduce, reuse, recycle</i> ) yang dilakukan secara partisipatif.	mengenai inovasi pengelolaan sampah.
--	---	---	--	--------------------------------------

Pertama, Maya Auliya Agustin (2019) dalam jurnalnya “Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pakusari Sebagai Kawasan Wisata Edukasi” meneliti terkait upaya pengelolaan sampah melalui Tempat Pemrosesan Akhir sebagai kawasan wisata edukasi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa diperlukan adanya sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sampah, yaitu dari pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta; lebih lanjut terciptanya partisipasi masyarakat terkait pengelolaan sampah sejak dari sumbernya; terjadinya perubahan positif dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan adanya perubahan TPA menjadi kawasan wisata edukasi.

Kedua, Firmansyah, Fatimah, Mubarakah (2016) dalam jurnalnya “Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat” meneliti terkait pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pendirian Bank Sampah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terciptanya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik; Terjadi peningkatan pendapatan kelompok pengelola Bank Sampah dan nasabahnya; Berjalannya usaha kerajinan

berbahan sampah yang dikelola oleh ibu-ibu di Desa Karanganyar; dan Terbangunnya kemitraan para pihak yang terkait dalam pengelolaan sampah.

Ketiga, Rizqi Puteri Mahyudin (2014) dalam jurnalnya “Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan” meneliti tentang manajemen pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sejumlah besar sampah harus dikelola dengan Pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan terintegrasi atau *ISWM/Integrated Sustainable Waste Management* fokus pada pengelolaan sampah sebagai multi aktor, kesepakatan multi lapisan sistem sosial teknik agar meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengurangan beban lingkungan pada TPA.

Keempat, A.E. Adeniran et al (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “*Solid Waste Generation And Characterization In The University Of Lagos For A Sustainable Waste Management*” secara umum jurnal ini meneliti tentang pengeolaan sampah dan daur ulang limbah padat di universitas lagos, nigeria. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kebijakan strategis dan partisipasi mahasiswa diperlukan untuk mengurangi sumber dan memperbaiki daur ulang limbah serta dapat menjadi dasar keputusan yang lebih baik mengenai strategi berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di kampus.

## **B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Konsep pemberdayaan pada dasarnya berkaitan dengan dua istilah yaitu konsep berdaya dan tidak berdaya dalam kaitannya dengan kemampuan mengakses dan menguasai potensi dan sumber kesejahteraan sosial (Cahyono, 2008:9). Pemberdayaan mengacu pada kata *empowerment* di dalam konteks masyarakat, pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat. Pemberdayaan sebagai terjemahan *empowerment* mengandung dua pengertian, yaitu (a) *to give power or authority* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain, (b) *to give ability to* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan atau bagaimana mengaktualisasikan keberdayaan seseorang (Wrihatnolo dan Riant N, 2007: 279-280). Rusmiyati (2011: 16) berpendapat bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya, atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pendapat lain terkait pemberdayaan adalah suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan dalam proses dan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kuntari, 2009: 12). Dalam proses pemberdayaan terdapat suasana kondusif (*enabling*), penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat (*empowering*), bimbingan dan dukungan (*supporting*), serta memelihara kondisi yang kondusif dan seimbang (*foresting*).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang dapat digunakan untuk pembangunan di masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Permendagri No.7 Tahun 2007). Winarni dalam Sulistiyani (2004:79) berpendapat bahwa inti dari suatu pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan, terciptanya kemandirian, memperkuat potensi atau daya. Dapat diketahui bahwa suatu pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi terjadi juga pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai suatu kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan dari, oleh, untuk, dan bersama dengan masyarakat (Mubarak, 2012: 377). Kemudian daripada itu batas antara sasaran dan pelaku pemberdayaan di masyarakat sangat dekat sekali sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran adalah sekaligus sebagai pelaku dari pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya konsep dari pemberdayaan masyarakat adalah menawarkan suatu proses perencanaan dari suatu pembangunan dengan memusatkan pada partisipasi masyarakat, kemampuan yang ada pada diri masyarakat dan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, melibatkan masyarakat perlu dilakukan pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dalam hal ini memiliki arti untuk menempatkan masyarakat sebagai aktor (subyek) pembangunan, perencanaan dan tidak menjadikan mereka hanya sebagai penerima pasif dari pelayanan saja.

Konteks dari pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat berperan aktif dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil dari suatu pembangunan. Suatu pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan dari subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang ada pada diri obyek. Dapat diketahui bahwa secara garis besar, pada proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan dari individu yang semula hanya obyek menjadi subyek. Proses pemberdayaan adalah merubah pola relasi lama dari hubungan yang asimetris antara subyek-obyek menjadi hubungan yang simetris yakni subyek-subyek (Suparjan dan Hempri S, 2003:46).

Berdasarkan pada pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses atau upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang ada pada diri masyarakat melalui pemberian pengetahuan dan ketrampilan dalam mencapai suatu kehidupan yang mandiri pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat, masyarakat tidak lagi ditempatkan hanya penerima pasif saja akan tetapi ditempatkan sebagai subyek perencanaan, pembangunan dan pemerintah berperan sebagai fasilitator atau pelayanan bagi masyarakat.

## **2. Model Pemberdayaan Masyarakat**

Model merupakan representasi dan menggambarkan dari objek dan pemikiran tertentu dalam bentuk yang sederhana. Dalam kaitannya Pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi beberapa bentuk model yang menjadi dasar untuk memahami konsep tentang pengembangan masyarakat. Menurut Suharto (2010:42) ada tiga bentuk model konsep pengembangan masyarakat, antara lain :

### (1) Pengembangan masyarakat lokal

Pengembangan masyarakat lokal dapat dijelaskan sebagai proses yang dimana ditunjukan untuk menciptakan suatu kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat. Pengembangan masyarakat lokal pada hakekatnya merupakan suatu proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial, pekerja sosial atau fasilitator membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat lokal bertujuan untuk lebih berorientasi pada proses dari pada tujuan di akhir atau hasil. Anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menentukan tujuan masing-masing dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### (2) Perencanaan sosial

Menunjuk pada proses perencanaan untuk menentukan keputusan dan menetapkan suatu tindakan dalam memecahkan permasalahan sosial tertentu seperti halnya pengangguran, kemiskinan, kebodohan (buta huruf), kenakalan remaja, kesehatan masyarakat yang buruk (rendahnya usia harapan hidup, tingginya tingkat kematian bayi, kekurangan gizi). Berbeda dengan penjelasan pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial lebih bertujuan pada tugas. Sistem klien perencanaan sosial umumnya merupakan kelompok-kelompok yang kurang mampu



atau kelompok rawan sosial pada sektor ekonomi. Keterlibatan para penerima pelayanan pada suatu proses pembuatan kebijakan, penentuan dari tujuan dan pemecahan permasalahan bukan prioritas, karena pengambilan keputusan dilakukan oleh para pihak yang berwenang di lembaga-lembaga formal.

### (3) Aksi sosial

Aksi sosial merupakan pendekatan yang didasari suatu pandangan bahwa masyarakat suatu sistem klien yang seringkali menjadi 'korban' ketidakadilan struktur. Sasaran dan tujuan utama aksi sosial adalah perubahan yang fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan, sumber dan pengambilan keputusan. Aksi sosial berorientasi pada tujuan proses serta tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui suatu proses penyadaran, pemberdayaan, dan tindakan-tindakan yang aktual untuk dapat mengubah struktur kekuasaan yang ada agar lebih memenuhi prinsip demokratis, kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan.

### **3. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat**

Perwujudan kemandirian masyarakat melalui berbagai proses tahapan belajar yang dilakukan secara terus menerus hingga masyarakat mencapai suatu kemandirian. Sulistiyani (2004:83) menjelaskan terkait tahapan yang harus dilalui meliputi :

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan,

kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku adalah tahap awal dimana persiapan dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam tahap ini pihak-pihak terkait dengan pemberdayaan berusaha menciptakan kondisi baru, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat yang efektif. Tahap kedua atau tahap transformasi kemampuan merupakan suatu proses bergantinya pengetahuan dan kecakapan-keterampilan. Dalam hal ini dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika pada tahap pertama telah terkondisi secara efektif. Pada tahap ini masyarakat hanya sekedar menjadi pengikut atau objek dari pembangunan saja, belum berperan aktif sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Tahap ketiga atau tahap peningkatan intelektual dan kecakapan keterampilan merupakan tahap yang diperlukan supaya masyarakat bisa membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam membentuk suatu inisiatif, melakukan inovasi dan kreasi di dalam lingkungannya.

Mardikanto (2013:125-127) berpendapat mengenai tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Berikut penjelasan tahap-tahap tersebut:

- 1) Tahap 1. Seleksi Lokasi
- 2) Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat
- 3) Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat
  - a) Kajian keadaan pedesaan partisipatif
  - b) Pengembangan kelompok

- c) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
  - d) Monitoring dan evaluasi partisipatif
- 4) Tahap 4. Pemandirian masyarakat.

Seleksi lokasi/ wilayah dilakukan secara runtut dan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh pihak lembaga, dan masyarakat. Setelah seleksi lokasi telah selesai dilakukan, tahapan selanjutnya merupakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari sosialisasi tersebut yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tentang program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Tahap selanjutnya merupakan proses pemberdayaan masyarakat. Dalam proses ini, hal-hal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan mengkaji potensi, permasalahan; menyusun rencana kegiatan; menerapkan rencana kegiatan; serta memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus. Tahap terakhir adalah pemandirian masyarakat. Pemandirian masyarakat dimaksudkan dengan melakukan pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar telah mampu mengelola sendiri kegiatannya.

Berdasar pemeparan diatas, dapat diketahui bahwa ada tiga tahapan pemberdayaan masyarakat yaitu:

- 1) Penyadaran diri masyarakat.

Penyadaran diri masyarakat dilaksanakan dengan cara sosialisasi. Tujuan dari tahap ini adalah mengkomunikasikan program dari kegiatan yang akan dilakukan serta menumbuhkan partisipasi, keinginan dan kemauan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan pemberdayaan tersebut.

2) Proses pemberdayaan masyarakat.

Perubahan cara pandang dan pikiran, serta memberikan keterampilan pada masyarakat. Dalam tahap ini masyarakat hanya memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu hanya sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum sampai pada taraf subjek.

3) Pemandirian masyarakat.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat untuk memandirikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemandirian masyarakat dilakukan dengan cara pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar dipastikan telah mampu mengelola sendiri kegiatannya. Kemandirian tersebut ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam membentuk pikiran serta kegiatan inisiatif, kreatif dan inovatif dalam lingkungannya.

#### **4. Indikator Keberdayaan**

Dalam peningkatan kualitas masyarakat dan memaksimalkan pengembangan pada potensi yang di miliki masyarakat tidak terlepas dari indikator keberdayaan dari masyarakat. Perlu juga dijelaskan berbagai indikator keberdayaan yang dapat menjelaskan dan menunjukan seseorang atau masyarakat dikatakan berdaya. Hashemi dan Riley (Edi. S, 2010) mengembangkan delapan indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai *Empowerment Index* atau Indeks pemberdayaan:

- 1) Kebebasan mobilitas: Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau keluar wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis,

bioskop, rumah ibadah, kerumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil: Kemampuan individu untuk membeli barang-barang (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu) kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, shampoo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- 3) Kemampuan membeli komoditas besar: Kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, point tinggi diberikan individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- 4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga. Mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami atau istri mengenai keputusan-keputusan keluarga.
- 5) Kebebasan relatif dan dominasi keluarga.
- 6) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: Seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes misalnya terhadap kekerasan dalam rumah tangga, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- 8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: Memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dan pasangannya.

## **5. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Hakekat dari tujuan pemberdayaan masyarakat ialah memandirikan dan membuat masyarakat lebih berdaya dalam mengatasi persoalan hidup mereka terutama terbebas dari masalah kemiskinan, keterbelakangan/ kesenjangan sosial dan ketidakberdayaan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Hikmat (2010:14) tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadilan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perilaku sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Merujuk pada penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui

potensi dan sumber daya manusia dengan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam membangun dan memelihara keberlangsungan hidup secara mandiri tanpa adanya kesenjangan sosial.

## **C. Konsep Kesejahteraan Sosial**

### **1. Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Mengacu pada undang-undang Nomor 11 tahun 2009 Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial. Salah satu indikator dalam menilai pada aspek spiritual adalah menggunakan indeks kebahagiaan, yang dimaksud indikator kebahagiaan adalah komposit dari berbagai indikator subyektif. Indikator kebahagiaan juga meliputi pekerjaan, pendapatan, kesehatan, pendidikan, relasi sosial, dan kondisi lingkungan.

Konsep kesejahteraan sosial juga dikemukakan oleh Nasikun (1993) yang berpendapat bahwa konsep kesejahteraan sosial dan martabat manusia dapat dilihat dari empat indikator yaitu: rasa aman (*security*), kebebasan (*freedom*), kesejahteraan (*welfare*), dan jati diri (*identity*). Melihat kualitas hidup masyarakat baik dari segi materi, fisik, lingkungan, dan spiritual dapat mencerminkan keadaan dari masyarakat itu sendiri. Kualitas kemampuan masyarakat juga diukur dengan keadaan yang lebih manusiawi dan tidak hanya diukur dari segi materi.

### **2. Indikator Kesejahteraan Sosial**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Daerah, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang tertangani. Kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan dengan kondisi dan keadaan realitas Indonesia dengan penggambaran akses pendidikan masyarakat, akses ekonomi masyarakat, dan juga akses kesehatan masyarakat, akses terhadap sumber daya ekonomi. Kesejahteraan sosial mencakup berbagai usaha untuk dikembangkan dalam peningkatan taraf hidup manusia, baik di bidang sosial ekonomi, spiritual, emosional, fisik, dan juga mental.

Chalid (2014) Menjelaskan sembilan ranah pengukuran dalam kesejahteraan sosial. Adapun ranah pengukuran tersebut antara lain :

1. Kemapanan Psikologis (Psychological Wellbeing)
  - a. Kepuasan hidup (Life satisfaction)
  - b. Keseimbangan Emosi (Emotional balance)
  - c. Spirituality
2. Kesehatan (Health)
  - a. Status kesehatan individu yang dilaporkan (Self-reported health status)
  - b. Hari-hari sehat (Healthy days)
  - c. Cacat permanen (Long-term disability)
  - d. Kesehatan mental (Mental health)
3. Pendidikan (Education)
  - a. Literasi (Literacy)



- b. Kualifikasi pendidikan (Educational qualification)
- c. Pengetahuan (Knowledge)
- d. Nilai (Values)
- 4. Kebudayaan (Culture)
  - a. Bahasa (Language)
  - b. Kemampuan berkesenian (Artisan skills)
  - c. Partisipasi sosial-budaya (Socio-cultural participation)
  - d. Driglam Namzha
- 5. Penggunaan Waktu (Time Use)
  - a. Jam kerja (Working hours)
  - b. Jam tidur (Sleeping hours)
- 6. Pemerintahan yang baik (Good Governance)
  - a. Partisipasi politik (Political participation)
  - b. Kebebasan berpolitik (Political freedom)
  - c. Pelayanan masyarakat (Service delivery)
  - d. Kinerja pemerintah (Government performance)
- 7. Kekuatan Komunitas (Community Vitality)
  - a. Dukungan sosial (Social support)
  - b. Hubungan komunitas (Community relationships)
  - c. Keluarga (Family)
  - d. Korban kriminal (Victim of crime)
- 8. Keanekaragaman Ekologi dan Kelenturan (Ecological Diversity and Resilience)

- a. Polusi (Pollution)
- b. Tanggung jawab lingkungan (Environmental responsibility)
- c. Kehidupan rimba (Wildlife)
- d. Isu perkotaan (Urban issues)

9. Standar Hidup (Living Standards)

- a. Pendapatan rumah tangga (Household income)
- b. Aset (Assets)
- c. Kualitas perumahan (Housing quality)

Ukuran dari kualitas dan keamanan hidup ialah diukur dengan dimensi yang lebih manusiawi dan komprehensif. Indikator kesejahteraan sosial juga di jelaskan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dengan menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Kemudian dijelaskan dalam UNDP (2004) IPM merupakan tolak ukur angka kesejahteraan dari suatu daerah atau negara yang dilihat dari tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).

## **D. Konsep Pembangunan Berkelanjutan**

### **1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan**

Menurut Marlina (2010: 54) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan saja. Pembangunan berkelanjutan juga mencakup tiga lingkup kebijakan, seperti pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Namun demikian, secara umum

pembangunan berkelanjutan selalu dikaitkan dengan pelestarian lingkungan alam serta generasi masa depan.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sudarmadji (2008:5) yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya.

Gondokusumo dalam Budhy (2005: 407) juga menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat tercapai apabila terdapat perencanaan serta perancangan yang bersifat ekologis dengan tetap melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan-kawasan di kota, proses-proses yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungannya. Ancaman utama pembangunan yaitu kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Maka dari itu perlunya memperhatikan perencanaan dan perancangan yang bersifat ekologis. Pada kawasan perkotaan ada tiga kriteria pembangunan berkelanjutan, seperti:

a) Pro keadilan sosial

Keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumber daya alam dan pelayanan publik, menghargai diversitas budaya dan kesetaraan gender.

b) Pro ekonomi kesejahteraan

Pertumbuhan ekonomi ditujukan agar kesejahteraan semua masyarakat dapat tercapai melalui teknologi inovatif yang berdampak minimum terhadap lingkungan sekitar.

c) Pro lingkungan berkelanjutan

Etika lingkungan nin-antroposentris menjadi pedoman hidup masyarakat, supaya masyarakat selalu mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, konservasi sumber daya alam vital, dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non-material.

Berdasar penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya secara sadar dan terencana dalam rangka pembangunan dari segala aspek kehidupan demi kepentingan masyarakat tanpa merugikan generasi yang akan datang

## **2. Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep yang sederhana namun sangat kompleks sehingga keberhasilan dari keberlanjutan sangat dipengaruhi oleh banyak prinsip. Haris dalam Fauzi (2004: 30) melihat konsep pembangunan berkelanjutan harus memenuhi 3 (tiga) prinsip, yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

a) Keberlanjutan Ekonomi

Haris dalam Fauzi (2004: 30) melihat keberlanjutan ekonomi dalam pembangunan harus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu agar dapat terus memelihara keberlanjutan pemerintahan. Lebih lanjut menurut Priyoga (2010:3) menyatakan bahwa keberlanjutan ekonomi dari perspektif pembangunan memiliki dua hal utama, keduanya mempunyai keterkaitan yang erat dengan tujuan aspek keberlanjutan lainnya. Keberlanjutan ekonomi makro menjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi

struktural dan nasional. Tiga elemen utama untuk keberlanjutan ekonomi makro yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkan pemerataan dan distribusi kemakmuran.

Sementara Munangsihe dalam Handono (2006:4) menjelaskan keberlanjutan ekonomi mencakup dua hal yaitu efisiensi dan pertumbuhan. Dimana adanya pembangunan dapat menimbulkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi disekitarnya. Peneliti sependapat dengan Munangsihe melihat keberlanjutan ekonomi dalam suatu pembangunan yaitu dari efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

b) Keberlanjutan sosial

Munangsihe dalam Handono (2006:4) mengartikan keberlanjutan sosial mencakup pengurangan kemiskinan dan pemerataan. Namun Haris dalam Fauzi (2004:30) menilai keberlanjutan secara sosial dapat dimaknai sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik. Ukuran keberlanjutan suatu pembangunan dapat dilihat pada prinsip keberlanjutan lingkungan. Dimana lingkungan menjadi bagian yang harus sangat diperhatikan bila membahas mengenai konsep pembangunan berkelanjutan sebab nantinya akan mempengaruhi keberlanjutan ekonomi maupun keberlanjutan sosial yang bersifat jangka panjang. Dapat disimpulkan bahwa prinsip keberlanjutan sosial harus berdasar pada pengurangan kemiskinan dan pemerataan dalam pemberian pelayanan.

c) Keberlanjutan lingkungan

Haris dalam Fauzi (2004:30) menyebutkan sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya secara stabil, menghindari

eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan secara berlebihan. Hal itu berkaitan dengan pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sumber-sumber ekonomi. Sementara Munangsihe dalam Handono (2006:4) melihat keberlanjutan lingkungan lebih sederhana yaitu mencakup konservasi sumber daya alam.

Priyoga (2010:3) menilai keberlanjutan lingkungan adalah prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan lingkungan akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. Oleh karena itu, untuk menjamin keberlanjutan lingkungan harus diupayakan hal-hal seperti :

- 1) Pemakaian sumber daya yang dapat diperbarui seharusnya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya tersebut.
- 2) Emisi untuk lingkungan seharusnya tidak melebihi kapasitas ekosistem-ekosistem individu.
- 3) Resiko dan bahaya untuk kesehatan manusia yang disebabkan oleh aktivitas antropogenik harus di minimalisasi.

## **E. Teori Inovasi**

### **1. Pengertian Inovasi**

Inovasi merupakan salah satu hal yang memiliki pengaruh terhadap berkembangnya sebuah organisasi. Baik instansi pemerintah maupun instansi non pemerintah berlomba menemukan inovasi-inovasi terbaru untuk meningkatkan kualitas organisasi. Sebastian (2014:12) mengungkapkan inovasi

atau *innovation* berasal dari kata *to innovate* yang berarti melakukan suatu perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru, yang memberikan nilai tambah (*added value*). Begitu juga dengan pendapat West dan Farr yang dikutip Ancok (2012:34), inovasi adalah pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses, produk dan prosedur yang baru pada unit yang menerapkannya, yang dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat luas. Pendapat tersebut didukung oleh Said (2010:27) yang menyatakan bahwa inovasi merupakan perubahan yang terencana dengan memperkenalkan teknologi dan penggunaan peralatan baru dalam lingkup kerja di instansi tertentu dengan didukung oleh instansi lainnya yang terkait, dan atau perbaikan cara kerja yang lebih berdaya guna dengan mengintegrasikan sumber daya sosial, sumber daya pegawai dan sumber daya kelembagaan yang ada telah menjadi isu utama dalam dunia pemerintahan dan segi-segi kehidupan yang terus diperbarui.

Susanto (2013:158) memberikan pandangan lain mengenai pengertian inovasi yang tidak hanya sebatas membangun dan memperbaharui namun juga dapat didefinisikan secara luas, memanfaatkan ide-ide baru untuk menciptakan produk-produk layanan. Sedarmayanti (2010:231) juga menjelaskan mengenai inovasi sebagai proses menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya atau saat ini yang bisa berupa penciptaan kecil atau sesuatu yang fantastis. Amanat terkait inovasi juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyebutkan bahwa inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan

dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam produk atau proses produksi.

Selanjutnya arti penting dari inovasi dijelaskan oleh Keeh, et al (2007:592) sebagai berikut:

- 1) Teknologi berubah sangat cepat seiring adanya produk baru, proses dan layanan baru dari pesaing, dan ini mendorong usaha *entrepreneurial* untuk bersaing dan sukses. Hal yang harus dilakukan adalah menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi baru.
- 2) Efek perubahan lingkungan terhadap siklus hidup produk semakin pendek, yang artinya bahwa produk atau layanan lama harus digantikan dengan yang baru dalam waktu cepat, dan ini bisa terjadi karena ada pemikiran kreatif yang menimbulkan inovasi.
- 3) Konsumen saat ini lebih pintar, bergolongan dan menuntut. Mereka mengharap lebih dalam hal kualitas, pembaruan, dan harga. Skill inovatif karena itu dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan konsumen sekaligus mempertahankan mereka.
- 4) Dengan pasar dan teknologi yang berubah sangat cepat, ide yang sejatinya bagus bisa semakin mudah ditiru dan ini membutuhkan metode penggunaan produk, proses yang baru dan lebih baik, dan layanan yang lebih cepat secara kontinyu.
- 5) Inovasi bisa menghasilkan pertumbuhan lebih cepat, meningkatkan segmen pasar, dan menciptakan posisi korporat yang lebih baik.



Dari beberapa definisi inovasi diatas, dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan sebuah cara pembaharuan dalam rangka pengembangan organisasi melalui proses, manajemen, produk dan prosedur baru menggunakan teknologi dan penggunaan peralatan yang menunjang penyelenggaraannya.

## **2. Tipologi Inovasi**

Pembaharuan merupakan inti dari inovasi, konsep dan produk inovasi wujud peningkatan kinerja maupun peningkatan pelayanan yang digunakan oleh organisasi dalam mengevaluasi masalah-masalah yang ada pada proses pencapaian tujuan organisasi. Mulgan & Albury (Muluk, 2008:44-45) menyatakan bahwa inovasi dikatakan berhasil jika merupakan hasil kreasi dan implementasi dari tipologi inovasi sebagai berikut:

- a. Inovasi produk atau layanan yang berasal dari perubahan bentuk dan desain produk atau layanan;
- b. Inovasi proses berasal dari gerakan pembaharuan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi;
- c. Inovasi metode pelayanan adalah perubahan baru dalam hal berinteraksi dengan pengguna layanan atau cara baru dalam memberikan pelayanan;
- d. Inovasi dalam strategi/kebijakan yang mengacu pada visi, misi, tujuan dan strategi baru beserta alasannya yang berangkat dari realitas yang ada;
- e. Inovasi dalam interaksi sistem yang mencakup cara baru atau yang diperbaharui dalam berinteraksi dengan aktor-aktor lain atau dengan kata lain adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan (*changes in governance*).

### 3. Atribut Inovasi

Suwarno (2008:12) menyatakan bahwa meskipun dalam mendefinisikan inovasi para ahli tidak memiliki pemahaman yang sama, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa inovasi memiliki beberapa atribut, diantaranya sebagai berikut:

a. *Relative Advantage* atau Keuntungan Relatif

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri, sehingga membedakannya dengan yang lain.

b. *Compability* atau Kesesuaian

Inovasi juga mempunyai sifat kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi ini secara lebih cepat.

c. *Complexity* atau Kerumitan

Inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

d. *Triability* atau Kemungkinan dicoba

Inovasi harus melewati fase “uji publik” dalam hal ini bertujuan untuk menilai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang sudah

ada. Produk inovasi setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari inovasi untuk mengukur nilai yang didapat dari inovasi tersebut.

e. *Observability* Kemudahan Diamati

Sebuah inovasi harus juga dapat dilihat, dirasakan, dari segi bagaimana suatu produk inovasi bekerja dan memberikan sesuatu yang lebih baik.

Penjelasan terkait atribut tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sebuah inovasi adalah cara baru untuk menggantikan cara lama dalam mengerjakan atau memproduksi sesuatu. Namun demikian, inovasi mempunyai dimensi geofisik yang menempatkannya baru pada satu tempat, namun boleh jadi merupakan sesuatu yang lama dan biasa terjadi disuatu tempat.

#### **4. Tahap-Tahap Inovasi**

Sebuah inovasi ada dengan inisiasi, tahapan dan proses pada setiap tahapannya dan inovasi tidak muncul secara instan. Proses dan diperlukan tahapan-tahapan merupakan kegiatan dalam munculnya suatu inovasi baru. Proses inovasi digambarkan berlangsung secara terus menerus sehingga memunculkan beberapa tahapan. Menurut De Jong dan Den Hartog (2003:26-27) terdapat beberapa fase dalam menggambarkan suatu inovasi. Berikut penjelasan terkait proses inovasi yang terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu:

- a. Melihat Kesempatan, pada tahap ini berkaitan dengan mengamati sesuatu adanya indikasi *trend* yang sedang berubah. Pola kerja yang tidak sesuai seperti misalnya kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi,

- b. Mengeluarkan ide, pada tahap ini pegawai mengeluarkan pemikiran dan konsep baru dengan tujuan menambah inovasi dan peningkatan. Seperti halnya mengeluarkan ide baru untuk memperbaiki suatu pelayanan dan teknologi pendukung.
- c. Implementasi, dalam fase ini pegawai harus dapat memiliki perilaku yang merujuk pada hasil. Pada tahap ini dibutuhkan keberanian dalam pengambilan resiko berkaitan dengan kemungkinan pada keberhasilan dan kegagalan.
- d. Aplikasi, pada fase ini perilaku dari pegawai ditujukan untuk membangun, menguji serta memasarkan pelayanan yang lebih baru.

## **5. Kemampuan Inovasi**

Tenziovski (Asropi, 2008:5) menjelaskan bahwa kemampuan inovasi merupakan penyedia potensi bagi munculnya inovasi efektif. Kemampuan inovasi birokrasi pemerintah bukanlah konsep yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai aspek manajemen, kepemimpinan, dan aspek teknis seperti alokasi sumber daya, pemahaman kepentingan *stakeholders*, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi birokrasi pemerintah kemampuan sangat berperan dalam penciptaan kreatifitas dan inovasi yang berujung pada peningkatan kinerja birokrasi pemerintah.

Asropi (2008:6) juga menjelaskan pendapat Terziovski mengenai kemampuan suatu lembaga pemerintah ditentukan oleh sejumlah faktor yang disebut sebagai dimensi kemampuan inovasi. Dimensi kemampuan inovasi tersebut meliputi visi dan strategi, perekatan dasar kompetensi, penguatan informasi dan kecerdasan organisasi orientasi pasar dan pelanggan, kreativitas dan

manajemen gagasan, sistem dan struktur organisasi, dan manajemen teknologi yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Visi dan strategi

Inovasi bukan hanya sebagai nilai utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi sekaligus ditempatkan sebagai sebuah visi. Dengan kedudukan inovasi yang demikian ini, maka strategi didesain untuk menghasilkan inovasi, diantaranya melalui penanaman nilai-nilai kewirausahaan dalam tubuh birokrasi pemerintah daerah. Ketika kepercayaan publik dijadikan sebagai tujuan pemerintah daerah, pemerintah daerah menjadi inovatif dalam upaya meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

b. Perekatan dasar kompetensi

Terdapat kesadaran pemerintah akan pentingnya kompetensi dari aparatur dalam pencapaian tujuan organisasi. Berbagai langkah strategis untuk peningkatan kompetensi aparatur harus dilakukan untuk meningkatkan kreatifitas aparatur sehingga lebih inovatif dalam pemberian pelayanan.

c. Penguatan kecerdasan organisasi dan informasi

Kelancaran dan kecepatan arus informasi sangat penting bagi keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah. Agar informasi dapat mengalir cepat dan lancar, pemerintah pada umumnya melakukan transformasi proses dengan mendasarkan pada kemampuan teknologi.

d. Orientasi pelanggan dan pasar

Pelanggan dari pelayanan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah adalah masyarakat umum, dan tugas utama pemerintah adalah memuaskan

masyarakat melalui pelayanan yang diberikan. Dalam hubungan pemerintah dan masyarakat ini, pemenuhan kepuasan masyarakat sebagai nilai yang harus tertanam pada setiap jiwa aparatur pemerintah.

e. Manajemen gagasan dan kreativitas

Inovasi dalam kaitannya tidak akan terjadi jika tidak ada kebebasan untuk memperluas suatu gagasan, pemikiran atau kreativitas. Inovasi merupakan tempat diletakkannya sebagai fokus dan tujuan utama manajemen sumber daya aparatur.

f. Manajemen teknologi

Teknologi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah membangun jaringan kerja berbasis teknologi yang mampu menghubungkan antar lembaga yang terkait.

## **F. Pengelolaan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)**

### **1. Pengertian Sampah**

Nugroho (2013:39) berpendapat bahwa sampah merupakan material sisa tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Lebih lanjut *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (depkes.go.id, 24 Agustus 2019). Sedangkan Kastaman dan Kramadibrata (2007:69) mendefinisikan sampah (*waste*) sebagai zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik berupa buangan domestik (rumah tangga) maupun buangan pabrik sebagai sisa

proses industri yang harus dikelola dengan baik sehingga tidak membahayakan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 Poin 1 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah adalah sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat atau semi padat berupa zat organik dan/atau anorganik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Nugroho (2013:40-41) menyebutkan sumber atau timbunan sampah terdiri dari:

- a. Sampah pemukiman, merupakan sampah rumah tangga dapat berupa sisa perlengkapan rumah tangga bekas, pengolahan makanan, gelas, kain, sampah kebun atau halaman, kertas, kardus, dan lain-lain;
- b. Sampah pertanian dan perkebunan, merupakan sampah yang terdiri dari sampah organik, sampah anorganik, sampah sayuran dan sampah dari bahan-bahan kimia;
- c. Sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung terdiri dari sampah kayu, triplek, pasir, semen, batu bata, ubin, kaca, besi, baja, dan kaleng;
- d. Sampah dari perdagangan dan perkantoran, berupa bahan organik, kertas, kardus, komputer rusak, tinta printer, klise film, baterai, tinta stempel dan lain-lain;
- e. Sampah industri merupakan sampah yang berasal dari seluruh rangkaian kegiatan produksi berupa perlakuan dan pengemasan produk berupa kertas,

kayu, bahan-bahan kimia serpihan atau potongan bahan, plastik, atau lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan.

## 2. Karakteristik Sampah

Mukono (2008:48) menjelaskan terkait karakteristik sampah. Berikut penjelasannya:

- a. *Garbage* merupakan suatu jenis sampah dari sisa-sisa potongan hewan atau sayuran hasil pengolahan yang sebagian besar terdiri dari zat-zat yang mudah membusuk, mengandung sejumlah air bebas, dan lembab;
- b. *Rubbish* merupakan sampah yang terdiri dari sampah yang dapat terbakar atau yang tidak dapat terbakar berasal dari rumah-rumah, kantor, pusat perdagangan, dan tidak termasuk dalam *garbage*;
- c. *Ashes* yaitu sisa-sisa dari pembakaran zat-zat yang mudah terbakar ditempatkan antara lain: di rumah, kantor dan industri;
- d. *Street sweeping* merupakan sampah yang berada di jalanan berasal dari pembersihan jalan dan trotoar baik dengan cara tenaga manusia maupun dengan tenaga dari mesin yang meliputi: kertas-kertas dan daun-daunan;
- e. *Dead animal* (binatang mati) yaitu bangkai dari binatang yang telah mati karena alam, kecelakaan, dan penyakit;
- f. *Household refuse* merupakan sampah campuran terdiri dari *rubbish*, *garbage*, *ashes*, dan berasal dari perumahan;
- g. *Abandoned vehicles* (bangkai kendaraan) merupakan kendaraan yang sudah tidak terpakai termasuk didalamnya kendaraan mobil, truk, dan kereta api;



- h. Sampah industri merupakan sampah yang terdiri dari sampah padat dan berasal dari industri-industri dan pengolahan hasil bumi;
- i. *Demolition wastes* merupakan sampah dari sisa-sisa perbaikan, pembangunan dan pembaharuan gedung;
- j. *Sewage solid* terdiri dari benda-benda kasar yang umumnya zat organik pada pintu masuk suatu pusat pengelolaan air hasil buangan;
- k. Sampah khusus yaitu sampah yang memerlukan penanganan khusus misalnya kaleng-kaleng cat, zat radioaktif.

Selanjutnya Nugroho (2013:41-52) melakukan pengelompokan sampah menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Berdasarkan sumbernya
  - 1) Sampah alam yaitu sampah ini berasal dari proses alam yang bisa untuk di daur ulang secara alami, seperti halnya daun kering yang berada di hutan yang secara alami dapat terurai menjadi tanah. Berbeda jika di kehidupan perkotaan, sampah tersebut dapat berubah menjadi masalah, misalnya daun kering tersebut dapat menyumbat saluran air yang mengakibatkan banjir.
  - 2) *Human waste* (Sampah manusia) merupakan kotoran dari proses pencernaan manusia, seperti feses dan urin.
  - 3) Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh pola konsumsi manusia (pengguna barang), konsumsi ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
  - 4) Sampah Industri merupakan bahan sisa pengeluaran akibat proses-proses industri.

b. Berdasarkan sifatnya

- 1) Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya.
- 2) Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas.

c. Berdasarkan bentuknya

- 1) Sampah padat, yaitu segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga: sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas, dan lain-lain.
- 2) Sampah cair, yaitu bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

### **3. Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah erat kaitannya dengan dengan kehidupan masyarakat. Hal ini didasari karena dari sampah akan hidup mikroorganisme penyebab penyakit dan menimbulkan masalah lingkungan lain. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan yang dimaksud sebagai pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Nugroho

(2013:60) menjelaskan prinsip-prinsip dalam pengelolaan sampah yang disebut sebagai 5M, yaitu:

a. *Reduce* (Mengurangi)

Mengurangi kaitannya dengan penggunaan barang habis pakai yang dapat menimbulkan permasalahan sampah. Karena semakin banyak konsumsi barang habis pakai maka akan semakin banyak penumpukan sampah.

b. *Reuse* (Menggunakan kembali)

Menggunakan kembali dalam hal ini adalah mengusahakan untuk mencari barang-barang yang bisa digunakan kembali, dan menghindari barang yang penggunaannya hanya sekali guna memaksimalkan umur barang tersebut.

c. *Recycle* (Mendaur ulang)

Mendaur ulang merupakan pemanfaatan barang yang digunakan untuk membuat barang yang tidak bisa dipakai lagi menjadi berguna serta tidak dibuang menjadi sampah.

d. *Replace* (Mengganti)

Pergantian barang dari yang sekali pakai dengan barang yang lebih tahan lama. Metode ini juga dilakukan untuk menggunakan barang yang ramah lingkungan.

e. *Respect* (Menghargai)

Menghargai dalam hal ini merupakan suatu metode untuk menggunakan rasa kecintaan pada alam, menjaga keseimbangan ekosistem sehingga bijaksana dalam memilih dan menggunakan suatu barang.

Proses akhir dari rangkaian penanganan sampah di Indonesia pada umumnya dilaksanakan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Menurut Manvi (2014:6) ada 3 (tiga) metode dalam pengelolaan sampah di TPA, yaitu:

a. *Open Dumping*

Dilakukan dengan cara sampah dibuang begitu saja di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan dibiarkan terbuka tanpa dilakukan penutupan dengan tanah sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan seperti perkembangan vektor penyakit, bau, pencemaran air permukaan dan air tanah serta rentan terhadap bahaya kebakaran dan longsir. Sampah yang ada dibiarkan begitu saja sampai pada suatu saat TPA penuh dan pembuangan sampah dipindahkan ke lokasi lain atau TPA yang baru. Untuk efisiensi pemakaian lahan, biasanya dilakukan kegiatan perataan sampah dengan menggunakan *buldoser* atau perataan dapat dilakukan dengan tenaga manusia.

b. *Controlled Landfill* (Penimbunan Terkendali)

Sebagai teknologi peralihan antara *open dumping* dengan *sanitary landfill*. Dilakukan dengan cara sampah ditimbun, diratakan dan dipadatkan pada kurun waktu tertentu untuk memperkecil pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan. Bila lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) telah mencapai akhir usia pakai, seluruh timbunan sampah harus ditutup dengan lapisan tanah. Diperlukan persediaan tanah yang cukup sebagai lapisan tanah penutup.

c. *Sanitary Landfill* (Lahan Urug Saniter)

Sistem pemrosesan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan

penutup. Hal ini dilakukan dengan terus-menerus secara berlapis-lapis sesuai rencana yang telah ditetapkan. *Sanitary landfill* ini merupakan salah satu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Pekerjaan pelapisan sampah dengan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.

Damanhuri dan Padmi (2011:82-83) menjelaskan tentang konsep dari penanganan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) seharusnya dapat bertumpu dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Penanganan sampah secara terpadu;
- b. Bahan hendaknya diupayakan untuk didaur ulang terlebih dahulu sebelum dilakukan pengurugan sampah ke dalam tanah;
- c. Dioperasikan sesuai dengan jenis pengolahan sampah, seperti biogasifikasi, pengomposan, dan insinerasi bila memenuhi syarat;
- d. Sarana dapat dioperasikan dengan bertanggungjawab, sehingga tidak mendatangkan permasalahan kesehatan dan estetika bagi masyarakat sekitar.

#### **4. Aspek Pengelolaan Sampah**

Keberhasilan pengelolaan sampah sebagai sarana umum selain aspek teknis juga dapat mencakup aspek non teknis. Berikut aspek-aspek yang mempengaruhi pengelolaan sampah (Damanhuri dan Padmi, 2011:6-8):

- a. Peraturan/ Hukum dan Kebijakan Publik

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi payung hukum pengelolaan sampah di Indonesia. Di tingkat daerah, pengelolaan persampahan membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti

pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, dan ketertiban masyarakat. Peraturan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan sampah daerah antara lain adalah mengatur ketertiban umum tentang penanganan sampah, rencana induk pengelolaan sampah, bentuk lembaga/ organisasi pengelola, tata cara pengelolaan, besaran tarif jasa layanan atau retribusi kerjasama dengan pihak terkait baik antar daerah maupun pihak swasta.

b. Kelembagaan dan Organisasi

Aspek organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multidisiplin yang bertumpu pada teknik dan manajemen menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial budaya, dan kondisi fisik wilayah daerah, serta memperhatikan pihak yang dilayani atau masyarakat. Perancangan dan pemilihan bentuk organisasi hendaknya sesuai dengan peraturan pemerintah yang membinanya, pola sistem operasional yang diterapkan, kapasitas kerja sistem, lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani.

c. Teknik Operasional Pengelolaan Limbah/Sampah

Teknik dari operasional dalam pengelolaan sampah di perkotaan umumnya meliputi dasar-dasar dari perencanaan kegiatan-kegiatan yaitu pengumpulan (*collection*), perwadahan (*storage*), pengangkutan (*transportation*), pemindahan (*transfer*), pengolahan (*treatment*), dan pemerosesan akhir (*final disposal*). Teknik operasional menjadi acuan baku bagi pengelola sampah kota dalam mengembangkan sarana dan prasarananya.

d. Finansial dan Ekonomi

Komponen pembiayaan sistem pengelolaan sampah kota secara ideal dihitung berdasarkan biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya manajemen, biaya untuk pengembangan. Biaya penyuluhan dan pembinaan masyarakat termasuk di dalam kegiatan rutin. Sumber daya penggerak roda sistem pengelolaan sampah kota adalah aspek pembiayaan.

e. Sosial

Kegiatan pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan yaitu merubah dan membiasakan masyarakat untuk menerima, melakukan sesuai dengan tujuan program pemerintah. Dalam hal ini diantaranya adalah mengubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib dan teratur, budaya setempat, faktor sosial, dan kebiasaan dalam pengelolaan sampah selama ini.

f. Lingkungan Hidup

Persoalan yang muncul dari pengelolaan sampah yang kurang baik bukan hanya terbatas pada persoalan estetika (sampah berserakan) atau bau sampah, atau bagaimana menangani sampah agar lebih efisien dan efektif. Tetapi juga aspek dampak yang ditimbulkannya seperti pencemaran atau kecelakaan/bencana yang dapat terjadi.

## **5. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)**

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat pemrosesan terakhir bagi sampah-sampah yang berada pada suatu wilayah tertentu (Fitri, 2013:10). Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dapat didefinisikan pula sebagai tempat

pengarantinakan sampah atau menimbun sampah yang diangkut dari sumber sampah sehingga tidak mengganggu lingkungan. Sistem pengelolaan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus diperhatikan guna tetap menjaga keseimbangan lingkungan.

Sistem pengelolaan sampah pada tahap pemrosesan akhir menggunakan beberapa metode diantaranya yaitu metode *open dumping*, metode *controlled landfill* dan metode *sanitary landfil* (Candra, 2007:44). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menempatkan aspek lingkungan hidup sebagai salah satu asas dasar pengelolaan sampah. Lebih lanjut Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berperan dalam memproses dan mengembalikan sampah-sampah ke media lingkungan secara aman bagi lingkungan dan ramah bagi manusia, sehingga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus dirancang sebagai tempat pengelolaan sampah secara aman dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Terobosan demi terobosan mutlak diperlukan agar masyarakat dapat menyadari bahwa sampah mampu menjadi sumber energi terbarukan, disamping itu memiliki manfaat ekonomis lainnya (Wahyuni, 2014:22).





Gambar 2. Paradigma Pengelolaan Sampah  
Sumber: lh.Jemberkab.go.id

Paradigma pengelolaan sampah dengan paradigma lama melalui penanganan akhir yaitu “*kumpul-angkut-buang*”. Kemudian berubah dengan paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, sedangkan yang dibuang adalah sampah yang benar-benar sudah tidak dapat dimanfaatkan, karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan dari produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir yaitu pada fase produk sesudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan secara aman ke media lingkungan. Konsep ini biasa disebut dengan 3R yaitu *reduce* (pengurangan), *reuse* (penggunaan kembali), *recycle* (Pendaaurulangan), dengan menggunakan paradigma baru penanganan sampah yaitu “*kumpul – pilah – olah – angkut*”